

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA

Pada saat ini, peran korporasi sudah sedemikian luasnya. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Dapat dilihat bahwa korporasi bergerak di berbagai bidang seperti industri pertanian, perbankan, hiburan dan sebagainya yang melibatkan perputaran uang yang tidak sedikit. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum, bahkan memunculkan korban yang menderita kerugian. Walaupun demikian, banyak korporasi yang lolos dari kejaran hukum sehingga tindakan korporasi yang bertentangan dengan hukum tersebut semakin meluas dan sulit dikontrol. Menjerat korporasi atas kejahatan yang dilakukannya melalui hal yang penting, namun yang penting adalah memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kejahatan korporasi.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban tindak pidana dalam hukum positif Indonesia saat ini, bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dan pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban tindak pidana dimasa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah : 1. metode pendekatan yuridis normatif, 2. spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, 3. jenis dan sumber data yaitu data sekunder, 4. teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder, 5. teknik analisis data yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut sesuai ketentuan hukum pidana positif Indonesia lebih condong pada doktrin teori identifikasi dan doktrin delegasi. Selain melihat pada letak kesalahan dari pembuat juga memperhatikan pada dari mana sumber kewenangan bertindak itu dimiliki. Namun, jika dilihat secara komprehensif, antara ketentuan dalam hukum pidana yang satu dengan hukum pidana yang lain juga berbeda-beda. Misalnya, tentang Pelaku, dimana orang yang melakukan tindak pidana tidak harus pengurus tetapi siapa saja yang mengatasnamakan atau melakukannya untuk kepentingan perusahaan.

Penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundang-undangan, penulis telah menyimpulkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan adalah : 1) Pidana pokok meliputi pidana denda. 2) Pidana tambahan dan 3) Sanksi Tindakan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi di masa yang akan datang diharapkan lebih seragam dan konsisten dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi, siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dalam kejahatan korporasi, serta jenis jenis sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang melakukan kejahatan, terutama dalam rangka memberikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban atas kejahatan yang dilakukan korporasi, serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi itu sendiri.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Korban Kejahatan Korporasi

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY OF CORPORATIONS TO THE VICTIMS OF THE CRIME

At this time, the role of corporations is so wide. Almost all aspects of community life involve corporations in it. It can be seen that corporation moves in various fields such as agricultural industry, banking, entertainment and so on which involves a velocity of money that is not small. It is an undeniable fact that the role of corporations today is very important in people's lives. The objective of the corporation to continue to increase its profits results in the frequent occurrence of unlawful acts, even raises the victims who suffer losses. However, many corporations have escaped legal prosecution so that corporate actions that are against the law are widespread and difficult to control. To entrap the corporation for the crime it does is important, but equally important is to provide protection to the victims of corporate crime.

The problems in this research are: how the corporation criminal responsibility to the victim of crime in Indonesia's positive law, how the corporate criminal responsibility to the victim of future crime, and how to apply sanction to corporation according to the laws and regulations in Indonesia in an effort to give Protection against crime victims.

The research method used is normative juridical approach method, the research specification is analytical descriptive, the type and source of data is secondary data, data collecting technique is literature study that is secondary data collection, data analysis technique that is qualitative analysis.

The results show that: The criminal liability system adopted in accordance with the provisions of Indonesian positive criminal law is more inclined to the doctrine of identification theory and the doctrine of delegation. In addition to looking at where the errors of the makers are also concerned with from where the source of acting authority is owned. However, when viewed in a comprehensive manner, between the provisions in criminal law that one with the other criminal law also varies. For example, about the perpetrator, where the person committing the crime does not have to be an administrator but anyone who is in the name or does so for the benefit of the company.

The application of sanctions against corporations according to the laws and regulations, the authors have concluded that the sanctions that can be imposed on corporations in an effort to provide protection against victims of crime are: 1) Criminal penalties include a fine of fines. 2) Additional criminal and 3) Action Sanctions.

The corporate criminal liability for corporations in the future is expected to be more uniform and consistent in terms of determining when a crime is said to be a corporate crime, who can be prosecuted and sentenced in a corporate crime, and what kind of sanction is appropriate for the corporation Who committed the crime, especially in order to provide the fulfillment and restoration of the rights of victims for crimes committed by the corporation, as well as in the framework of prevention and handling of corporate crime itself.

Keywords: *Corporate Crime Responsibility, Corporate Crime Victim*